

ABSTRAK

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2019 sebagai pedoman pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Namun, setelah lima tahun penerapan, permasalahan sampah di kota ini masih belum terselesaikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dengan meninjau aspek kebijakan publik, akuntabilitas, transparansi, serta implementasi anggaran. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III (1980) yang mencakup komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi hanya berjalan efektif di internal pemerintahan, sementara komunikasi kepada masyarakat masih minim. Disposisi kebijakan berjalan baik ketika mendapatkan tekanan oleh legislatif dan kelompok eksternal. Keterbatasan sumberdaya dalam hal ini menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Dari sisi struktur birokrasi, SOP dan fragmentasi telah dijalankan sesuai regulasi. Namun, akuntabilitas dan transparansi dari implementasi anggaran kepada publik masih sangat terbatas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengolahan Sampah, Peraturan Walikota Tasikmalaya